

EDISI : *Kelip 16 Oktober 2019*

KLIPING BERITA MEDIA CETAK KABUPATEN BULELENG



PENYUSUN :
SUB BAGIAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL
SETDA KABUPATEN BULELENG

RESUME BERITA

EDISI :Rabu, 16 Oktober 2019

| NO | NAMA MEDIA | JUDUL BERITA | RESUME | KET. |
|----|------------|---|---|------|
| 1 | FAJAR BALI | Pemkab Buleleng Cegah Penyalahgunaan Medsos Pada ASN | Penyalahgunaan Media Sosial di kalangan Aparatur Sipil Negara maupun masyarakat umum semakin marak, maka dari itu Pemerintah Kabupaten Buleleng melalui Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian Kabupaten Buleleng, menyiapkan berbagai upaya pencegahan penyalahgunaan manfaat medsos pada ASN serta seluruh masyarakat Kabupaten Buleleng. Hal tersebut diungkapkan kepala Diskominfosandi Kabupaten Buleleng I Ketut Suweca yang ditemui usai menghadiri rapat paripurna penyampaian nota pengantar Bupati atas beberapa rancangan pengaturan daerah. | |
| 2 | POS BALI | Ratusan Warga Bungkulan Ngelurug Kantor BPN Buleleng | Ratusan warga Desa Bungkulan, Kecamatan Sawan, Buleleng ngelurug Kantor Badan Pertanahan Nasional Buleleng, Selasa (15/10). Kedatangan mereka untuk menanyakan tindak lanjut atas kasus penyerobotan lahan lapangan sepak bola dan puskesmas pembantu I Desa Bungkulan, yang disertifikatkan perseorangan oleh Kusuma Ardana sejak tahun 2013 lalu. Rombongan warga ini dipimpin oleh Klian Banjar Adat Punduh Lo Desa Bungkulan, Putu KembarBunda bersama tokoh masyarakat Desa Bungkulan, Ketut Sumardana. | |
| | | BUMDes Patas Bermasalah, Ditemukan Kredit macet Rp821 Juta | Kondisi pengelolaan keuangan pada Badan Usaha Masyarakat Desa Patas, sangat memprihatinkan. Berbagai persoalan terjadi pada BUMDes yang beriri tahun 2010 dan mulai berjalan tahun 2012 silam ini. Hal itu | |

| | | | |
|--|--|---|--|
| | | | <p>terungkap saat digelar Musyawarah Desa Desa Patas, Kecamatan Gerokgak, Buleleng pada Selasa (15/10) di Gor Amatha Yudha Desa Patas. Dalam musdes tersebut dibahas soal pelaporan tim penyehatan BUMDes Amatha dan tinjauan operasional BUMDes, melibatkan anggota BPD Desa Patas, aparat Desa, Perbekel Patas.</p> |
| | | <p>Polres Buleleng Bekuk Empat Pelaku Narkoba</p> | <p>Saat asyik berada di areal peternakan ayam aduan, Made Beni Ariawan alias Cak Lole (35) warga Banjar Dinas Tengah, Desa Banyuatis, Kecamatan Banjar, Buleleng, dibekuk jajaran Satres Narkoba Polres Buleleng, pada Minggu (6/10) lalu sekitar pukul 16,00 wita. Penangkapan Cok Lole berkat pengembangan dari penangkapan pelaku narkoba sebelumnya. Berdasarkan informasi yang diterima, penangkapan Cok Lole yang diduga sebagai pengedar dimulai dari ditangkapnya Putu Susila alias Cepot (47) sekitar pukul 15.30 wita di pinggir jalan Desa Bengkel-Banyuatis.</p> |



KLIPING BERITA MEDIA CETAK KAB BULELENG

Nama Media : *Pos Bali*

Kategori : *Narkoba*

Polres Buleleng Bekuk Empat Pelaku Narkoba

BULELENG, POS BALI - Saat asyik berada di areal peternakan ayam aduan, Made Beni Ariawan alias Cak Lole (35) warga Banjar Dinas Tengah, Desa Banyuatis, Kecamatan Banjar, Buleleng, dibekuk jajaran Satres Narkoba Polres Buleleng, pada Minggu (6/10) lalu sekitar pukul 16.00 WITA. Penangkapan Cak Lole berkat pengembangan dari penangkapan pelaku narkoba sebelumnya.

Berdasarkan informasi yang diterima, penangkapan Cak Lole yang diduga sebagai pengedar bermula dari ditangkapnya Putu Susila alias Cepot (47) sekitar pukul 15.30 WITA di pinggir jalan Desa Bengkel-Banyuatis. Dari tangan Cepot, polisi menemukan satu paket sabu-sabu seberat 0,26 gram yang sempat dibuang oleh Cepot.

Dari keterangan Cepot, polisi mendapat informasi bahwa barang haram tersebut dibeli dari seseorang yang bernama Beni Ariawan alias Cak Lole seharga Rp500 ribu. Atas pengakuan dari Cepot, polisi kemudian melakukan pengembangan dan berhasil menangkap Cak Lole di lokasi peternakan ayam aduan di Desa Banyuatis.



POS BALI/RIK

JAJARAN Polres Buleleng menunjukkan keempat pelaku dan sejumlah barang bukti narkoba yang berhasil diamankan.

Dari tangan Cak Lole diamankan barang bukti berupa uang tunai Rp500 ribu hasil penjualan, satu buah botol aqua bekas yang tutupnya ada 2 lobang, satu korek api gas, tiga plastik plip bekas pakai, dan barang bukti lainnya. Selanjutnya, Cak Lole digiring ke Mpolres Buleleng untuk menjalani pemeriksaan.

"Dari keterangan tersangka yang kami amankan sebelumnya, kami lakukan pengembangan menuju orang yang telah menjual paket sabu-sabu atau sumber didapatkan paket sabu itu, sehingga kami amankan tersangka Cak Lole. Dari keterangannya, tersangka Cak Lole

mengakui telah menjual barang itu ke tersangka Cepot," ungkap Kasat Narkoba Polres Buleleng, AKP Made Derawi, Selasa (15/10).

Selain menangkap kedua pelaku yang masih satu jaringan, polisi juga kembali menciduk dua pelaku lainnya, yakni Nusrat Dana Jaya alias Dani (47) warga Jalan Hasanudin, Buleleng, pada Minggu (6/10) sekitar pukul 16.30 WITA. Dani dibekuk di wilayah Jalan Pantai Indah. Dari hasil penggeledahan, polisi menemukan satu paket sabu-sabu dengan berat 0,13 gram.

Polisi juga menciduk Richard Nasar alias Richard (34) warga Jalan

Hasanudin, Buleleng pada Senin (7/10) sekitar pukul 23.30 WITA. Ia dibekuk di wilayah Jalan Pulau Menjangan, Kelurahan Banyuning, Buleleng. Saat digeledah, polisi menemukan satu paket sabu-sabu seberat 0,07 gram.

AKP Made Derawi menerangkan, penangkapan keempat pelaku ini dari hasil penyelidikan yang dilakukan secara intensif terhadap peredaran narkoba di wilayah Buleleng. "Dari hasil penyelidikan, kemudian kami mengungkap para pelaku narkoba. Kami berhasil mengamankan barang bukti berupa narkoba jenis sabu-sabu dengan total berat 0,34 gram yang menjadi tiga paket," katanya.

Tersangka Cepot, Richard dan Dani terancam dijerat dengan Pasal 112 ayat (1) UUR No. 35 Tahun 2019 tentang Narkotika dengan ancaman hukuman pidana paling lama 12 tahun penjara atau denda paling banyak Rp8 miliar. Sedangkan Cak Lole dijerat Pasal 114 ayat (1) atau Pasal 112 ayat (1) UUR No. 35 Tahun 2019 tentang Narkotika dengan ancaman hukuman pidana paling lama 20 tahun penjara atau denda paling banyak Rp10 miliar. **018**

Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi

~ BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL - SETDA KABUPATEN BULELENG ~



KLIPING BERITA MEDIA CETAK KAB BULELENG

Nama Media : Pos Bali

Kategori : BPN

Ratusan Warga Bungkulan Ngelurug Kantor BPN Buleleng

■ Sertifikat Atas Nama Kusuma Ardana Terancam Dibatalkan

BULELENG, POS BALI - Ratusan warga Desa Bungkulan, Kecamatan Sawan, Buleleng ngelurug Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Buleleng, Selasa (15/10). Kedatangan mereka untuk menanyakan tindak lanjut atas kasus penyerobotan lahan lapangan sepak bola dan Puskesmas Pembantu I Desa Bungkulan, yang disertifikatkan perseorangan oleh Kusuma Ardana sejak tahun 2013 lalu.

Rombongan warga ini dipimpin oleh Klian Banjar Adat Punduh Lo Desa Bungkulan, Putu Kembar Budana bersama tokoh masyarakat Desa Bungkulan, Ketut Sumardana. Kedatangan ratusan warga tersebut mendapatkan pengamanan ketat dari anggota Polres Buleleng.

Hanya perwakilan warga yang diterima menemui Kepala BPN Buleleng, Ketut Sudarma. Dalam pertemuan itu, dibahas mengenai status sertifikat yang terbit atas nama Kusuma Ardana saat itu menjabat Perbekel Desa Bungkulan melalui Prona. Dua bidang tanah yang diajukan Kusuma Ardana adalah tanah yang menjadi fasilitas umum (fasum) dan terbit Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2426, dan SHM No. 2427 atas nama Ketut Kusuma Ardana.

Ditemui usai pertemuan, Putu Kembar Budana mengatakan, saat ini persoalan status lahan tersebut sudah diambil alih oleh Kanwil BPN Provinsi Bali. Terkait dengan permohonan warga tentang pembatalan sertifikat tersebut, menurut Budana, hal itu sudah diproses. "Sudah diambil alih BPN Provinsi, itu yang disampaikan kepada kami. Kalau soal pembatalan, mungkin masih proses.



POS BALURIK

SEJUMLAH warga Desa Bungkulan saat mendatangi kantor BPN Buleleng, Selasa (15/10).

Secara fisik saya belum lihat, namun informasinya sudah," katanya.

Tokoh masyarakat Desa Bungkulan, Ketut Sumardana mengaku akan terus mengawal kasus ini hingga benar-benar tuntas. "Kami minta BPN segera tuntaskan kasus ini. Masalah sertifikat di jadikan jaminan di BPD Bali oleh oknum itu bukan urusan kami," ucap mantan anggota DPRD Buleleng periode 2014-2019 ini.

Sementara itu, Kepala BPN Buleleng, Made Sudarma, menjelaskan, pihaknya telah melakukan pemeriksaan data fisik dan data yuridis terkait lahan tersebut. Dari hasil pengecekan ke lapangan, terus dilakukan analisa terhadap masing-masing bidang tanah yang menjadi sengketa. Berita acara hasil analisa itu sudah dikirim ke Kanwil BPN Provinsi untuk ditindaklanjuti.

"Nanti kami yang akan melakukan presentasi pada gelar perkara nanti," jelasnya.

Hasil analisa yang dikirim tersebut yakni, merekomendasikan mencabut sertifikat yang diterbitkan melalui program prona yakni SHM No. 2426, dan SHM No. 2427, atas nama Ketut Kusuma Ardana. Upaya pencabutan sertifikat itu, karena para penyanding tanda batas melakukan penarikan pernyataan dan tanda tangan.

"Kami simpulkan ada cacat administrasi karena alas hak untuk memproses penerbitan sertifikat itu yakni surat pernyataan penguasaan fisik (sporadik), saksinya menarik pernyataannya. Ya karena tidak sah, analisis menyimpulkan bahwa ada cacat administrasi dalam penerbitan sertifikat sehingga sertifikat itu kami batalkan alias dicabut," pungkas Sudarma. 018

Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi

BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL - SETDA KABUPATEN BULELENG



KLIPING BERITA MEDIA CETAK KAB BULELENG

Nama Media : Pos Bali

Kategori : BUMDes

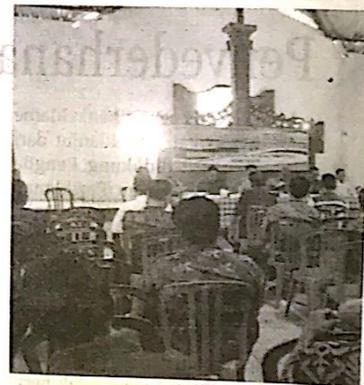
BUMDes Patas Bermasalah, Ditemukan Kredit Macet Rp821 Juta

BULELENG, POS BALI - Kondisi pengelolaan keuangan pada Badan Usaha Masyarakat Desa (BUMDes) Patas, sangat memprihatinkan. Berbagai persoalan terjadi pada BUMDes yang berdiri tahun 2010 dan mulai berjalan tahun 2012 silam ini. Hal itu terungkap saat digelar Musyawarah Desa (Musdes) Desa Patas, Kecamatan Gerokgak, Buleleng pada Selasa (15/10) di Gor Amarthartha Yudha Desa Patas.

Dalam musdes tersebut dibahas soal pelaporan tim penyehatan BUMDes Amarthartha dan tinjauan operasional BUMDes, melibatkan anggota BPD Desa Patas, aparat Desa, Plh Perbekel Patas, mantan perbekel Patas, perwakilan Kecamatan Gerokgak, dan masyarakat Desa Patas. Bahkan terungkap beberapa kejanggalan soal pengelolaan BUMDes Amarthartha Desa Patas.

Koordinator Tim Penyehatan BUMDes Amarthartha Desa Patas, Komang Widiartawan mengatakan, berdasarkan hasil audit tim, sisa uang saat ini di BUMDes tersebut hanya berkisar Rp21 juta. Padahal, kata dia, modal BUMDes tersebut mencapai Rp1 miliar lebih, yang bersumber dari dana hibah Pemprov Bali melalui Program Gerbangsada Mandara, LPMD, dan pemerintah desa.

Selain itu, menurut Widiartawan, ada beberapa kejanggalan yang ditemukan yakni terdapat kredit macet sebesar Rp821 juta. Dimana sebesar Rp465 juta itu dari total kredit macet itu paling besar digunakan oleh pengurus dan karyawan. "Pengurus dan karyawan pinjam uang di BUMDes tanpa jaminan. Nilai yang dipinjamkan puluhan sampai ratusan juta. Sisa uang digunakan untuk operasional," kata Widi-



MUSDES digelar masyarakat Desa Patas pengelolaan BUMDes Patas, Selasa (15/10) artawan.

Sejauh ini pengurus BUMDes hanya

Juni lalu. Sehingga, masyarakat menolak LPJ mereka, karena dinilai seolah mengada-ada dengan membuat LPJ BUMDes untung Rp30 juta. "Dengan kejanggalan itu, kami akan merekomendasikan untuk melakukan perombakan pengurus BUMDes," ujar Widiartawan.

Selain itu Widiartawan mengaku, akan segera menempuh jalur hukum untuk menyelesaikan masalah ini. "Karena dari pihak pengurus tidak ada niat baik sama untuk mengembalikan uang BUMDes. Selain itu ada kerugian negara juga ditimbulkan," tegasnya.

Perbekel non aktif Desa Patas, Nyoman Suberata justru tidak menampik kondisi BUMDes Patas. Dijelaskannya, pemerintah kecamatan sudah mendesak pengurus membuat laporan LPJ, namun LPJ BUMDes baru dilaporkan pada tahun

2019 sehingga masyarakat kecewa dan menolak LPJ tersebut.

"Kami sudah cari jalan keluar dengan melaporkan kepada pemerintah kecamatan dan kabupaten untuk dibina. Namun setelah dibina, tak ada hasil. Pengurus BUMDes yang bermasalah ada 3 karyawan dan 2 orang, nasabah sekitar 300 orang. Dan nasabah BUMDes bukan perorangan saja tapi ada berkelompok," ucap Suberata.

Sementara itu, Ketua BPD Desa Patas, Nursalim menegaskan, terkait adanya permintaan dari masyarakat agar proses BUMDes ini terus dikawal oleh BPD, kewenangan itu ada di tangan Perbekel, termasuk rencana menempuh jalur hukum. "Kami hanya bisa mengawal, setelah itu kami menunggu proses selanjutnya dari pemerintah desa," katanya. 018

sekali memberikan laporan pertanggung jawaban (LPJ) pada musdes sekitar bulan



KLIPING BERITA MEDIA CETAK KAB BULELENG

Nama Media : Pos Bali

Kategori : Putusan MA

PK Ditolak, Pemkab Buleleng Bayar Utang ke UD Serbajaya

BULELENG, POS BALI

- Permohonan Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan Pemkab Buleleng terkait dengan objek perkara utang piutang atas gugatan UD Serbajaya, akhirnya ditolak Mahkamah Agung (MA).

Pasca-terbitnya putusan itu, Pemkab Buleleng pun menerima dan taat pada proses hukum yang berlaku untuk menjalankan putusan tersebut.



Bersambung
HAL. 15 →

POS BALI/IST
KABAG Hukum Setda Buleleng, Bagus Gede Berata.

Sambungan hal. 1

Kepala Bagian Hukum Setda Buleleng, Bagus Gede Berata mengatakan, dari Pemkab Buleleng sudah menerima pemberitahuan putusan PK terhadap perkara No. 750/PK/Pdt/2018, tanggal 6 Agustus 2019 lalu. Dalam putusan itu disebutkan, permohonan PK yang diajukan Pemkab Buleleng pada perkara yang berproses sejak Desember 2015 lalu ditolak.

"Disana disebutkan, bahwa mewajibkan Pemerintah Kabupaten Buleleng untuk membayar sejumlah uang sesuai putusan pengadilan," ujar Bagus Berata, Senin (14/10).

Terhadap putusan PK ini, Pengadilan Negeri (PN) Singaraja telah melakukan pertemuan dengan dengan pihak-pihak yang berperkara, pada 26 September 2019 lalu.

Pertemuan tersebut sebagai tindak lanjut atas permohonan eksekusi atas putusan PK yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Dalam pertemuan tersebut disepakati beberapa hal, antara lain bahwa Pemkab Buleleng (Tergugat) siap melaksanakan putusan PK tersebut, dimana Pemkab Buleleng akan membayar sejumlah uang sesuai gugatan pihak penggugat (UD. Serbajaya).

"Sebagai badan hukum publik, maka pembayaran sejumlah uang dimaksud akan dianggarkan dalam APBD, yang memerlukan proses. Sehingga, dalam upaya pemenuhan kewajiban itu sesuai putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, itu memerlukan waktu dan koordinasi dengan pihak terkait," pungkask Bagus Berata.

Untuk diketahui, perkara ini

berawal dari adanya pembelian dengan bon sejumlah alat kelengkapan kantor oleh Bagian Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Buleleng pada UD. Serbajaya selama kurun waktu 2008 sampai dengan 2012, namun faktanya hingga kini pihak UD. Serbajaya belum menerima pelunasan pembayaran bon itu. Perkara ini sudah berproses sejak Desember 2014.

Dalam gugatannya, pihak penggugat (UD. Serbajaya) menggugat tergugat (Pemkab Buleleng) untuk membayar utang sebesar Rp94.479.750. Terhadap utang tergugat tersebut, penggugat juga menggugat tergugat untuk dikenakan denda sebesar 6 persen per tahun yang dihitung sejak gugatan didaftarkan di pengadilan pada 30 Desember 2014 sampai dengan tergugat melunasi utangnya kepada penggugat. 018

Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi

BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL - SETDA KABUPATEN BULELENG